



Standardisasi Tarif Becak demi Kepentingan Semua

Idealnya Rp 5.000 Per Kilometer

YOGYAKARTA, KOMPAS – Belum adanya standardisasi tarif becak di Kota Yogyakarta menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan penarik becak. Masyarakat pun berpeluang dirugikan akibat ketidakpastian tarif yang hanya ditentukan lewat proses tawar-menawar antara penarik becak dan penumpang.

Ketua Asosiasi Paguyuban Becak Kota Yogyakarta Totok Yudianto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan standar tarif yang sesuai dan menguntungkan, baik bagi penarik becak sendiri maupun penumpang.

"Sejauh ini, ada kalanya penumpang dirugikan karena tarif yang terlalu mahal. Namun, tak jarang pula penarik becak merugi lantaran tarifnya kurang. Kurangnya tarif ini bisa terjadi akibat persaingan tidak sehat di kalangan penarik becak," ujar Totok usai *launching* kartu identitas dan rompi bagi penarik becak di Kantor Kecamatan

Kraton, Yogyakarta, Senin (29/12).

Saat ini jumlah total penarik becak di Kota Yogyakarta diperkirakan mencapai sekitar 12.000 orang. Dari jumlah tersebut, 7.665 orang di antaranya tergabung dalam paguyuban.

Menurut Totok, ada 134 paguyuban becak di tingkat basis atau memiliki pangkalan di lokasi-lokasi tertentu, seperti depan Hotel Inna Garuda dan Hotel Santika Premier. Sisanya adalah penarik becak lepas yang bebas menentukan tempat mangkal.

Tidak sulit

Mengenai berapa besarnya tarif

yang nantinya diambil, Totok mengatakan hal tersebut akan disepelekan bersama. Tidak terlalu sulit untuk melakukan koordinasi dengan rekan-rekan penarik becak karena wilayah Kota Yogyakarta dibagi dalam lima sektor, yakni utara, selatan, barat, timur, dan tengah.

Saat ini sudah ada dua kawasan yang setuju mengenai standardisasi tarif tersebut, yakni penarik becak yang berada di Kawasan Jalan Malioboro dan Jalan Jenderal Sudirman.

Melihat karakter permukaan tanah di Kota Yogyakarta, menurut Totok, acuan yang tepat untuk menentukan besarnya tarif adalah berdasar perhitungan jarak, bukan per wilayah. "Idealnya Rp 5.000 per kilometer. Selama ini, kan, ada yang menarik lebih, namun ada pula yang hanya Rp 2.000 sehingga merugikan bagi penarik becak itu sendiri," kata Totok.

Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Yogyakarta Hadi Muhtar menyambut baik rencana standardisasi tarif. Menurut dia, yang berhak menentukan besarnya tarif becak adalah paguyuban karena merekalah yang mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

"Kami memang baru saja mengundang 1.000 penarik becak untuk dilakukan pembekalan. Selama ini, banyak komplain dari masyarakat menyangkut tarif. Bahkan, ada penumpang yang diturunkan di tengah jalan lantaran masalah itu," tutur Hadi. (WER)

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Dihaturkan Kepada Yth

Tembusan Kepada Yth

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT
1. <i>Din. Hub</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat se
2. <i>D. S. P. S. D.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.		
4.		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005